

KRITIK TERHADAP NARASI KETUHANAN BERKEBUDAYAAN SUKARNO DALAM RUU HIP



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Disusun Oleh:

Ferdiansah

NIM. 16510048

Pembimbing: Ali Usman, S.Fil.I, M.Ag

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdiansah
NIM : 16510048
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat : Dsn. Plalangan, RT.04/RW.04, Desa Karang Kedawung,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
Judul Skripsi : Kritik Terhadap Narasi Ketuhanan Berkebudayaan Sukarno
Dalam RUU HIP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Jika skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merivisi dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Apabila ternyata lebih dari 1 (satu) bulan revisi skripsi sebelum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia dimunaqsyahkan kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya saya seluruhnya adalah hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung beban sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaanya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Ferdiansah
NIM. 16510048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ferdiansah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi perbaikan seperlunya, saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ferdiansah

NIM : 16510048

Judul Skripsi : Kritik Terhadap Narasi Ketuhanan Berkebudayaan
Sukarno dalam RUU HIP

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Pogram Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.) dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Dengan ini maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Pembimbing



Ali Usman, S.Fil., M.Ag.

NIP. 19840420 201903 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1622/Un.02/DU/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : Kritik Terhadap Narasi Ketuhanan Berkebudayaan Soekarno dalam RUU HIP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FERDIANSAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16510048
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe332ca770aa



Penguji II
Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe95ca83be5b



Penguji III
Novian Widiadharna, S.Fil., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe30d1b21953



Yogyakarta, 14 Desember 2020
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fe99e024e0d4

Motto

“Screpta Manent, Verba Volant”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pancasila dalam sejarahnya mengalami perdebatan yang cukup alot, antara mengikuti keputusan sidang BPUPK tanggal 22 Juni 1945 yang memuat Piagam Jakarta atau mengikuti sidang konstitusional PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi tentang UUD NRI tahun 1945. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” belakangan ini semenjak munculnya RUU HIP diasumsikan oleh sebagian ormas akan digantikan dengan sila “Ketuhanan Berkebudayaan”. Rumusan RUU HIP ini menjadi polemik, maka kemudian apa konsepsi Ketuhanan Berkebudayaan menurut Sukarno? dan bagaimana kaitannya dengan Konsepsi sila Ketuhanan Yang Maha Esa?.

Sila Ketuhanan dalam perjalanannya, menjadi sila Pancasila yang paling panjang pembahasannya, karena berbagai gagasan para *founding fathers* antara yang menginginkan negara Indonesia sebagai negara yang beragama atau sebagai negara agama?. Mengingat sebelumnya, ketika proses sidang kedua BPUPK disepakati sila pertama pancasila yang memuat narasi “Ketuhanan dan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hingga pembacaan teks proklamasi, sila tersebut masih bertahan sebagai keputusan konstitusional. Namun, kemudian berakhir ketika sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas tentang Dasar Negara dan penentuan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memahami konsepsi filosofis-historis “Ketuhanan Berkebudayaan” Perspektif Sukarno yang seringkali dibenturkan dengan Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kemudian menelisik konsepsi Sukarno tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsepsi Ketuhanan Berkebudayaan Sukarno perlu ditelaah kembali agar tidak menjadi miskonsepsi di ruang publik. Perlunya tafsir aksiologis tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsepsi Ketuhanan Berkebudayaan menurut Sukarno adalah suatu bentuk aktualisasi aksiologis *muamalah*, dan kaitannya relasi antara Ketuhanan Berkebudayaan Sukarno dan Ketuhanan Yang Maha Esa itu ibarat iman dan amal. Iman secara metafisik Sukarno yaitu kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan mengamalkannya dengan jalan Kebudayaan.

Keywords: *Ketuhanan Berkebudayaan, Sukarno dan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah lumpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sang pejuang yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Penyusunan skripsi dengan judul “**Kritik terhadap Narasi Ketuhanan Berkebudayaan Sukarno dalam RUU HIP**” yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini penulis tentu saja banyak memperoleh wawasan, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa, memberi dukungan serta bantuan hingga selesainya karya ilmiah ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Muhammad Fathkan, M.Hum selaku Ketua Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Bapak Novian Widiadharna M.Hum selaku Sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam.
5. Bapak Dr. Mutiullah, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Ali Usman, S.Fil.I, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini bisa paripurna sebagai karya ilmiah.
7. Seluruh dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah membagikan pengalaman dan ilmunya
8. Segenap Staff TU yang telah memberi bantuan demi lancarnya tugas akhir ini
9. Kepada kedua orang tua peneliti yang selama ini senantiasa telah memberikan support doa serta moral kepada peneliti.
10. Irma Yuliani, S.E, M.E yang telah banyak membantu peneliti hingga bisa bertahan hingga detik ini.
11. Kemudian kepada kawan-kawan di Prodi AFI 2016 (Arloji), terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

Semoga curahan rahmat Allah tetap terlimpahkan kepada kita semua, aamiin. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 2 November 2020

Ferdiansah

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II BIOGRAFI SUKARNO.....	16
A. Kehidupan Awal Sukarno	16
B. Karya Intelektual Sukarno.....	20
C. Aktivitas Politik Sukarno	25
D. Sukarno Sebagai Penggali Pancasila.....	27
BAB III KONSEP KETUHANAN BERKEBUDAYAAN SUKARNO	33
A. Polemik RUU HIP	34
B. Landasan Konseptual Ketuhanan Berkebudayaan.....	36
BAB IV KONSEPSI SUKARNO TENTANG KETUHANAN YANG MAHA ESA	47
A. Polemik Sila Pertama Pancasila	47
B. Titik Temu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dewasa ini sering menjadi polemik di ruang publik. Polemik ini semakin massif dengan adanya peran media sosial. Pancasila bukan hanya menjadi perdebatan di ruang elit-akademis, tetapi juga menjadi perbincangan di kalangan anak muda. Pancasila bahkan kembali mencuat akhir-akhir ini akibat dari munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), terutama yang cukup menjadi sorotan adalah terkait dengan dimasukkannya narasi “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” dalam pasal 7 RUU HIP.

Selain itu, dalam beberapa pasal RUU HIP ini sendiri telah menjadi perdebatan publik, karena tidak dimasukkannya konsideran TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme, Leninisme. Pentingnya memasukkan Konsideran tersebut oleh beberapa kalangan dimaksudkan sebagai anti tesis bagi paham Komunisme/PKI yang selama ini ditakutkan kebangkitannya oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Lebih jauh, RUU HIP sendiri bagi sebagian golongan ormas Islam dianggap sebagai proyek sekularisasi suatu golongan tertentu untuk memecah ideologi bangsa bahkan diduga sebagai neo-liberalisme di Indonesia. Dalam

konteks ini, Pancasila dalam perjalanannya sering dibenturkan dengan konsepsi-konsepsi yang sejatinya keliru. Melalui RUU HIP tersebut, diisukan bahwa sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa ” akan digantikan dengan “Ketuhanan yang Berkebudayaan” yang diasumsikan dapat mencederai spirit Pancasila itu sendiri.

Menurut sebagian kalangan, RUU HIP mengandung agenda politis untuk mendeligitimasi secara persuasif alam pikiran pancasila, dan RUU HIP tersebut dianggap dapat mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila, serta dianggap sebagai alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia.¹ Hal ini pun ditakutkan sebagai upaya terselubung kelompok tertentu, untuk menyisipkan sekularisme² dalam tubuh Pancasila.

Secara historis, perdebatan tentang Pancasila telah terjadi sejak awal digagas oleh Sukarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945 hingga berakhir pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak awal munculnya, pancasila menjadi teks dasar negara yang diperdebatkan karena munculnya perbedaan pandangan di kubu kebangsaan dan keislaman. Kemudian pada gilirannya, pancasila akhirnya disepakati sebagai konsensus nasional setelah ditetapkannya UU Dasar 1945 yang memuat nilai-nilai pancasila dalam batang tubuhnya.

¹ <https://republika.co.id/berita/qbubz6430/polemik-ketuhanan-yang-berkebudayaan-dalam-ruu-hip> diakses 01 Oktober 2020.

² Sekularisme yang dimaksud di sini bukan *Freedom of Religion*, tetapi *Freedom from Religion*.

Namun dari berbagai perdebatan panjang nan melelahkan itu, baik anggota golongan kebangsaan maupun golongan Islam pandangannya tidaklah monolitik; pada masing-masing golongan itu (Nasionalis dan Islamis), selalu ada orang yang berdiri pada posisi antara (*liminal*) yang berperan sebagai jembatan penghubung di antara keduanya. Kemudian dari pada itu, secara substantif keduanya memiliki kesepahaman yang luas. Hal ini berdasarkan bukti sejarah bahwa para pengusul untuk setiap gagasan sila dari dasar negara pada sidang BPUPK maupun PPKI berasal dari kedua golongan tersebut. Kedua golongan tersebut kemudian menemukan titik temu untuk membentuk negara persatuan, meminjam bahasa Soepomo sebagai negara nasional yang bersatu dan memelihara budi-pekerti kemanusiaan.

Meskipun demikian, para tokoh pendiri bangsa ini dalam proses perumusan pembentukan dasar negara tidaklah mengenyampingkan dasar ketuhanan, yang hingga hari ini menjadi titik simpul bagi sila lainnya, yakni yang termaktub dalam sila pertama Pancasila. Konsepsi dasar Pancasila yang dibangun oleh Sukarno sejatinya digali dari akar realitas sejarah bangsa Indonesia. Konsepsi yang digali Sukarno tersebut berlandaskan pada prinsip “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”. Karena pada tahun 1926, Sukarno menulis Esai dalam majalah *Indonesia Moeda* dengan judul, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” yang merupakan tiga ideologi besar dunia. Sukarno mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi tersebut demi terciptanya senyawa

antar ideologi dalam kerangka konstruksi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.³

Selain itu, sekitar awal tahun 1930-an, Sukarno mencoba merumuskan sintesis dari substansi ketiga unsur ideologi tersebut dalam istilah “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi”. Maksud dari “sosio-nasionalisme” adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, yang tidak hanya mencari gebyarnya atau kilaunya negeri luar saja (besarnya pengaruh dan hebatnya negara-negara besar), tetapi suatu konsepsi yang berusaha mencari keselamatan semua manusia. Sedangkan “sosio-demokrasi” menurut Sukarno adalah demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, “demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki”.⁴

Sukarno dalam kesempatan lain mengatakan “kita bersama-sama mencari persatuan *philosofische grondslag*, mencari satu ‘*Weltanschauung*’ yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi

³ Yudi latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia Utama, 2011), hlm. 7.

⁴ Sukarno, *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*, dalam Majalah Pikiran Rakyat tahun 1932.

setujui, yang saudata Abikoeso setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus”.⁵

Dalam sejarah persiapan Kemerdekaan, Pancasila ketika di sila pertama masih tercantum tujuh kata “menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sebagaimana usulan kalangan Islam, atau yang umumnya disebut sebagai Piagam Jakarta menimbulkan kritik dari kalangan kebangsaan. Pencantuman tujuh kata tersebut dianggap sebagai perlakuan khusus bagi umat Islam dan dirasa tidak cocok dalam suatu payung hukum dasar warga negara secara keseluruhan. Sehingga akhirnya puna pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang di dalamnya memuat persetujuan terhadap naskah “Piagam Jakarta” sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali tujuh kata di belakang sila ketuhanan tersebut dicoret dan diganti dengan frasa “Yang Maha Esa”. Sehingga selengkapnya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa ”.⁶

Pancasila kemudian hingga saat ini telah menjadi disiplin keilmuan yang selalu seksi dikaji, baik dari sisi ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Membaca dan menelaah pancasila ibarat menimba air di lautan; yang seakan tidak ada habisnya. Karena Pancasila selalu terbuka dan dinamis untuk ditafsirkan. Pancasila digali dari akar realitas sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara yang dalam setiap rentang sejarah rezim yang berkuasa selalu memiliki tantangannya sendiri. Pada setiap zamannya,

⁵ Narasi pidato Pancasila dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

⁶ Yudi latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia Utama, 2011), hlm. 35.

Pancasila selalu terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politiknya, padahal Pancasila sendiri berfungsi sebagai falsafah bangsa dan konsensus nasional.

Perlu dipahami bahwa Pancasila itu tidak sepenuhnya ide Sukarno, tetapi pancasila merupakan hasil konferensi bersama para pendiri bangsa yang mana di dalamnya terdapat prinsip nilai yang mengakomodir seluruh elemen bangsa. Namun, sosok Sukarno memang menjadi penggali utama gagasan dasar pancasila dengan kepiawaian dan kecerdasannya, ia mampu meyakinkan dan menyampaikan gagasannya secara sistematis dan komprehensif dalam sidang BPUPK.

Sukarno sebagai sosok penggali Pancasila telah mengkonsepsikan pancasila sebagai alat pemersatu dan alat perjuangan bangsa Indonesia. Ia meletakkan pancasila sebagai alat untuk melawan imprealisme. Ketika itu, imprealisme menjadi tema penting dalam pidato-pidato Sukarno, sejak persiapan hingga pasca kemerdekaan. Bagi Sukarno, pancasila memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni pancasila sebagai meja statis dan *leitstar* dinamis. Pancasila sebagai meja statis berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh elemen bangsa. Kemudian sebagai *Leitstar* (bintang pimpinan), pancasila berfungsi sebagai penuntun arah ke mana rakyat, bangsa dan negara ini hendak melaju. Keduanya berada dalam jiwa bangsa Indonesia.

Dalam proses Islamisasi Nusantara, relasi dakwah dan budaya begitu melekat. Oleh karenanya, Islam dengan cepat berkembang dan diterima secara

luas di negeri ini. Sebab melalui budaya, orang dan kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Budaya mencakup banyak aspek dalam kehidupan manusia: seperti bahasa, adat istiadat, nilai, norma, adat istiadat, organisasi, dan lain-lain. Sebuah “bangsa” tidak akan eksis jika orang tidak hidup berdampingan secara kebudayaan.

Pada gilirannya, selain Sukarno, peran dari pencoretan “tujuh kata” merupakan andil besar dari sosok proklamator Mohammad Hatta, seperti tersurat dalam otobiografinya. *Memoir Mohammad Hatta* (1979). Pada saat pagi hari menjelang dibukanya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar berkenan mengganti “tujuh kata” dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Alasan kuatnya adalah demi menjaga pesatuan bangsa.⁷ Melalui pencoretan tujuh kata tersebut, moralitas “gotong royong” sebagai dasar dari Pancasila serta moralitas “kekeluargaan” sebagai dasar sistematis UUD mendapatkan tempatnya.

Maka dari itu, menilik pasal 7 RUU HIP yang masih problematik. Perlunya merekonstruksi kembali konsepsi Sukarno akan gagasan “Ketuhanan yang Berkebudayaan” yang pada gilirannya seringkali dipertentangkan dengan Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

⁷ Hatta, M, *Memoir Mohammad Hatta* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 57-59.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini setidaknya ingin menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsepsi filosofis Sukarno tentang Ketuhanan Berkebudayaan?
2. Bagaimana konsepsi Sukarno tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa?

C. Tujuan Penulisan

Berkelindan dengan kegelisahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Memahami konsepsi filosofis-historis “Ketuhanan Berkebudayaan” Perspektif Sukarno yang seringkali dibenturkan dengan Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Menelisik konsepsi Sukarno tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Tinjauan Pustaka

Sukarno tentu bukanlah sosok yang asing dalam belantara kehidupan masyarakat dan para intelektual di Indonesia. Namun sejauh

penulis amati, masih belum ada penulisan, artikel, atau buku yang spesifik membahas tentang konsepsi Filosofis Ketuhanan Berkebudayaan, sebagaimana menjadi gagasan Sukarno. Berikut ini adalah beberapa karya yang membahas tentang gagasan Ketuhanan Sukarno.

Pertama, Stella Y.E Pattipeilohy, *Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia*.⁸ Dalam artikel ini Stella mendeskripsikan bahwa sila pertama pancasila merupakan sebuah interkulturalitas yang sehat melalui konsep ketuhanannya yang terbuka. Sila pertama pancasila adalah sebuah hermeneutik interkultural yang terbuka dan aktif. Tetapi artikel ini hanya fokus mendedah secara historis bahwa konsepsi masyarakat pancasila yang diwariskan dari zaman prasejarah itu bersifat sinkretik. Yang dalam bahasa Sumarjdo bahwa “tuhan” Indonesia merupakan keutuhan kosmis yang menyatukan, merekonsiliasi dan mengharmonisasi semua polarisasi kepada yang Tunggal. Artikel ini fokus kepada kajian interkulturalis, berbeda dengan fokus kajian penulisan ini, yakni konsepsi filosofis Ketuhanan Yang Berkebudayaan menurut Sukarno.

⁸ Stella Y.E Pattipeilohy, *Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia* dalam Jurnal GEMA TEOLOGIKA Vol. 3 No. 2, Oktober 2018

Kedua, Zainul Akmal, *Relevansi Pasal 29 Konstitusi terhadap sila pertama Pancasila sebagai Dasar Negara*.⁹ Dalam Pasal 29 tersebut menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya. Dalam hal ini, Pasal ini oleh Akmal dianggap tidak relevan lagi dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa . Fokus dari kajian artikel ini adalah mendedah irrelevansinya pasal 29 konstitusi dalam menjawab permasalahan krisis kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini pula tidak ada pembahasan tentang Ketuhanan Yang Berkebudayaan perspektif Sukarno.

Ketiga, Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*.¹⁰ Dalam disertasi ini, Rizieq secara eksplisit menyebutkan bahwa Piagam Jakarta merupakan pintu gerbang penegakan syariah Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas historis dan konstitusi. Menurutnya, Piagam Jakarta mengandung rumusan Pancasila yang paling tulen.¹¹ Rizieq berasumsi bahwa Sukarno telah menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk menguatkan kekuasaannya, salah satunya dengan melindungi paham Marxisme, Komunisme, dan Sosialisme. Kajian ini

⁹ Zainul Akmal, *Relevansi Pasal 29 Konstitusi terhadap sila pertama Pancasila sebagai Dasar Negara* dalam Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018

¹⁰ Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Disertasi di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2012

¹¹ *Ibid.* hlm. 208.

berfokus pada penerapan syariah Islam berdasarkan pada Pancasila, dan hal tersebut berbeda dengan fokus penulisan ini yang memfokuskan pada konsepsi filosofis Ketuhanan Yang Berkebudayaan Perspektif Sukarno.

Keempat, Buku Yudi Latif berjudul *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*.¹² Dalam buku ini secara terang benderang, Yudi menuangkan gagasan Sukarno tentang Ketuhanan Yang Berkebudayaan, mulai dari perspektif historis dan perspektif teoretis-komparatif. Yudi secara ciamik mendedahkan problem ketuhanan yang selama ini menghantui negara yang terbentuk, apakah suatu negara itu harus berlandaskan agama atau berpisah sama sekali dari agama?. Menurut Yudi, ada faktor budaya yang dipengaruhi oleh agama yang menjadi rintangan bagi kemajuan. Akan tetapi, beberapa penulisan juga menunjukkan bahwa faktor keyakinan memberikan kontribusi yang penting dalam proses demokrasi, karena ia dapat mempengaruhi aspek-aspek demokrasi itu sendiri. Dan tentu banyak faktor yang ikut menyertainya, sehingga dalam konteks mana pula, ia menjadi pendorong kemajuan, merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Karya *Magnum Opus* Yudi ini menelaah secara historis komprehensif, pentingnya aktualitas ketuhanan berkebudayaan Sukarno.

¹² Yudi latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia Utama, 2011.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif berbasis berbasis data (*library based-research*). Riset yang berguna untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna, nilai, serta pengertian.¹³ Penulisan berbasis data kepastakaan ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data- data terkait subjek yang dikaji. Adapun metode penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

i. Sumber Data

Sebagai penulisan berbasis pustaka, ada dua jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu data-data primer dan data-data sekunder. Keprimeran sebuah data sangat ditentukan oleh relevansinya dengan kajian sejarah Pancasila di awal terbentuknya sebagai objek kajian.

Sumber data primer penulisan ini dari buku-bukunya Sukarno, diantaranya; *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid 1 dan 2.¹⁴ Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Sukarno¹⁵, Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-pikiran Sukarno Muda¹⁶. Sedangkan buku-buku sekunder dari Yudi Latif, *Negara Paripurna*;

¹³ Kaelan, *Metode Penulisan Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 5.

¹⁴ Sukarno, *di bawah bendera Revolusi* (Jakarta: Banana Books, 2016).

¹⁵ Sukarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Sukarno* (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2013).

¹⁶ Sukarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-pikiran Sukarno Muda* (Bandung: Segi Arsy, 2015).

*Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas*¹⁷, kemudian *Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perubahan*,¹⁸ serta buku *Wawasan Pancasila*.¹⁹

Sebuah data disebut sekunder apabila relevansinya tidak terlalu kuat. Namun, meskipun demikian, dalam penerapannya nanti penulisan ini tidak memandang sebelah mata signifikansi data-data sekunder dalam mencari kemungkinan dan perspektif baru terhadap subjek kajian.

ii. Teknik Pengumpulan Data

Data-data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, maupun esai jurnal ilmiah. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan sumbangannya terhadap kajian ini. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan dari data-data yang kemudian diolah jauh dari pembahasan kajian ini, tetapi sebenarnya mendukung dan memberi perspektif tambahan yang diperlukan dalam kajian ini.

b. Pengolahan Data

i. Pendekatan atau Metode Analisis

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif²⁰ dan interpretatif, sebagai upaya untuk mengungkap makna objek

¹⁷ Yudi latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Kompas Gramedia Utama, 2011).

¹⁸ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perubahan (Jakarta: Mizan, 2014).

¹⁹ Yudi Latif, Wawasan Pancasila; Bintang Penuntun untuk Kebudayaan edisi komprehensif (Jakarta: Mizan, 2020)

dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang berada di luar objek.²¹ Di sisi lain, metode ini juga tidak sekedar mengungkapkan makna melainkan juga menerangkan hakikat realitas baik berupa nilai-nilai dan pengetahuan dalam realitas tertentu. Metode ini dipakai untuk memahami konsepsi filosofis Sukarno tentang Ketuhanan Berkebudayaannya. Gagasan Sukarno di sini akan dipahami berdasarkan dimensi normatif dan historisnya. Hanya saja, dari awal diberi tekanan pada segi-segi yang relevan dengan tema penulisan ini.

ii. Langkah-langkah Penyajian

Setelah menganalisis dan menyeleksi data-data yang telah terkumpul, penulis kemudian melakukan penyajian. Penyajian dilakukan dengan pertama-tama mendeskripsikan konsepsi filosofis Ketuhanan yang Berkebudayaan Sukarno, kemudian dikaitkan dengan dengan pemahaman sebagian orang yang sinis terhadap idenya Sukarno.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan tersusun secara sistematis, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab pertama, memuat paparan mengenai kegelisahan akademis, mengapa penulisan ini perlu untuk dilakukan serta bagaimana tujuan

²⁰ Kaelan, *Metode Penulisan Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58

²¹ *Ibid.* hlm. 77.

dari penulisan ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana konsepsi ketuhanan yang Berkebudayaan Sukarno dari kacamata filosofis. Dalam bab I ini juga dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan oleh penulis.

Bab kedua, memuat biografi Sukarno dan beberapa pandangannya terhadap ideologi Pancasila. Bab ini diperlukan agar pembaca dapat mengetahui kerangka ataupun cara berfikir Sukarno dan hal yang melatarbelakangi konsepsinya tentang Pancasila.

Bab ketiga, berisi tentang konsep ketuhanan yang berkebudayaan Sukarno.

Bab keempat, berisi mengenai konsepsi Sukarno tentang Ketuhanan Yang Maha Esa . Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan beberapa gagasan Soekarno yang beliau tuliskan atau katakan dari beberapa buku dan seminarnya.

Bab terakhir, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penulisan dan saran untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Konsep Ketuhanan Berkebudayaan pada gilirannya mengalami mispersepsi di kalangan masyarakat Indonesia. Terutama semenjak mencuatnya naskah RUU HIP ke ruang publik pertengahan tahun 2020. Konsep tentang ketuhanan berkebudayaan banyak disalahartikan sebagai suatu konsepsi yang akan mencederai spirit sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep ketuhanan berkebudayaan Sukarno bagi sebagian kalangan dianggap sebagai membudayakan agama, atau menprofankan agama yang sakral. Padahal yang dimaksud ketuhanan berkebudayaan di sini adalah suatu bentuk aktualisasi politis-muamalah daripada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahkan relasi antara ketuhanan Yang Maha-Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan ialah relasi iman dan amal. Iman Sukarno tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun cara mengamalkan iman tersebut, adalah melalui jalur berkebudayaan. Kemudian frasa Ketuhanan Berkebudayaan itu pada prakteknya tidak berdiri sendiri. Tentu Sukarno menjelaskan kandungan nilai di dalamnya, yakni ketuhanan tanpa egoisme beragama. Ini berarti

ketuhanan tanpa sektarianisme dan sekat primordial. Ketuhanan yang berbudi pekerti, yang berarti hormat menghormati.

Dalam konteks ini, Ketuhanan Berkebudayaan memiliki makna yang sederhana, yakni ketuhanan yang toleran. Bukan ketuhanan yang didominasi oleh praktik budaya yang dianggap menyimpang dari kemurnian agama. Kebudayaan dengan agama selaras dan beriringan dalam menyertai perjalanan bangsa Indonesia.

b. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan konsepsi Ketuhanan Berkebudayaan Sukarno secara historis dengan telaah filosofis dengan menelaah beberapa literatur yang mendukung kebutuhan peneliti. Namun, peneliti masih merasa kurang referensi karena Sukarno sendiri sebagai konseptor belum secara komprehensif memaparkan tentang konsepsi ketuhanan berkebudayaan. Konsep yang ia bangun masih dalam tahap penjelasan naratif, belum sepenuhnya filosofis. Untuk itu, peneliti berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk meninjau kembali secara mendalam pikiran Sukarno, terutama yang masih belum bisa diakses hingga hari ini, karena banyak sekali dari karya-karya Sukarno yang ditelan bumi dan bisa jadi ada di museum negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayyadl, M. (2012). *Teologi Negatif Ibnu Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Anshari, Endang Saifuddin, (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, 1.j. c.1. Jakarta : Gema Insani Press.
- Atmaja, N. B. (2007). *Metodologi Penulisan Kuantitatif*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bakker, A., & Charris, A. (1990). *Metodologi Penulisan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus.
- Cindy Adams, (2007). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Djaja, Wahjudi, (2018). *Sukarno Pejuang Bangsa Sejati*. Klaten: Cempaka Putih.
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisus.
- Hatta, M. (1982). *Memoir Mohammad Hatta*. Jakarta: Tinta Mas.
- Her Suganda, (2015). *Jejak Sukarno di Bandung (1921-1934)*, Jakarta: Kompas.
- Huntington, S.P. (2004). *Who we Are?: The Challenges to America's National Identity*, (New York: Simon & Schister.
- Husserl, Edmund. (1902). *The Idea of Fenomenology*. Jerman: Kluwer Academic Publishers.
- Kaelan, (2005). *Metode Penulisan Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

- Pabottingi, M. (2001). “*Di Antara Dua Jalan Lurus*”. Dalam *St. Sularto (Ed.). Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, Jakarta: Kompas.
- Peter Kasenda, (2010). *Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sukarno, (1932). *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*, dalam *Majalah Pikiran Rakyat* tahun
- Sukarno, (2013). *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Sukarno Tentang Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Sukarno, (2015). *Islam Sontoloyo, pikiran-pikiran sekitar pembaharuan pemikiran Islam*. Bandung: Segarsy.
- Sukarno, (2016). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Banana Books.
- Solihin Salam, (1984). *Bung Karno Putra Fajar*, Jakarta: Gunung Agung.
- Stella Y.E Pattipeilohy, (2018). *Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia* dalam *Jurnal GEMA TEOLOGIKA* Vol. 3 No. 2.
- Syafi’I Ma’arif, (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Syihab, Habib Muhammad Rizieq, (2000). *Dialog Piagam Jakarta*, 1.j. c.1. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah.
- Syihab, Habib Muhammad Rizieq. (2012). *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Disertasi di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Yudi latif, (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia Utama.

Yudi latif, (2014). *Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perubahan*. Jakarta: Mizan.

Yudi latif, (2020). *Wawasan Pancasila; Bintang Penuntun untuk Kebudayaan* edisi komprehensif. Jakarta: Mizan.

Zainul Akmal, (2018). *Relevansi Pasal 29 Konstitusi terhadap sila pertama Pancasila sebagai Dasar Negara* dalam Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3.

Link Akses :

<https://republika.co.id/berita/qdki3e320/penempatan-ketuhanan-berkebudayaan-pemikiran-Sukarno>

<https://news.detik.com/berita/d-5247686/panitia-sembilan-anggota-tugas-dan-tujuan-dibentuknya-lengkap> diakses 09 Desember 2020

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/dekrit-presiden-5-juli-1959/>

<https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR> diakses 09 Desember 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA